



DINAMIKA POLITIK LOKAL PEMILIHAN KEPALA DESA 3 PERIODE STUDI PADA DESA DEWA AGUNG KECAMATAN BAHUGA KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG

Pitri Andayani¹, Ryllian Chandra Eka Viana², Reni Apriani³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang

Email : pitriandayani24@gmail.com¹, ryllianchandra_uin@radenfatah.ac.id²,
reniapriani_uin@radenfatah.ac.id³

Abstract (English)

The researcher will discuss the Dynamics of Local Politics, which emerged as a result of the Village Head Election. The village head election is part of the local democracy process which is often colored by complex political dynamics. This study aims to analyze the political strategies used by the village head in winning the election for three consecutive terms in Dewa Agung Village, Bahuga District, Way Kanan Regency, Lampung Province. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, where data is collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The main data source is obtained from the local community. The results of the study indicate that the success of the incumbent village head in maintaining power for three terms is supported by several main factors, namely the use of social networks and family relationships, campaign strategies based on personal communication with the community, and success in developing infrastructure and social programs that improve the welfare of residents. In addition, this study also found that the existence of long-term power dominance has the potential to inhibit leadership regeneration and cause political inequality at the village level.

Article History

Submitted: 1 March 2025

Accepted: 8 March 2025

Published: 19 March 2025

Key Words

Local Politics, Village Head Election, Political Strategy, Power Domination

Abstrak (Indonesia)

Peneliti akan membahas Dinamika Politik Lokal, muncul akibat Pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa merupakan bagian dari proses demokrasi lokal yang seringkali diwarnai oleh dinamika politik yang kompleks. Studi ini bertujuan untuk menganalisis strategi politik yang digunakan oleh kepala desa dalam memenangkan pemilihan hingga tiga periode berturut-turut di Desa Dewa Agung, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sumber data utama diperoleh dari masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kepala desa petahana dalam mempertahankan kekuasaan selama tiga periode didukung oleh beberapa faktor utama, yaitu pemanfaatan jejaring sosial dan hubungan kekeluargaan, strategi kampanye berbasis komunikasi personal dengan masyarakat, serta keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur dan program sosial yang meningkatkan kesejahteraan warga. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa adanya dominasi kekuasaan dalam waktu yang lama berpotensi menghambat regenerasi kepemimpinan dan menimbulkan ketimpangan politik di tingkat desa.

Sejarah Artikel

Submitted: 1 March 2025

Accepted: 8 March 2025

Published: 19 March 2025

Kata Kunci

Politik Lokal, Pemilihan Kepala Desa, Strategi Politik, Dominasi Kekuasaan



Pendahuluan

Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan salah satu wujud demokrasi lokal yang memberi kesempatan kepada masyarakat desa untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Pilkades memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di tingkat desa serta mencerminkan dinamika politik yang terjadi di tingkat lokal. Salah satu fenomena menarik dalam Pilkades adalah keberhasilan seorang kepala desa yang mampu menjabat hingga tiga periode berturut-turut.

Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa merupakan regulasi yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan ditingkat desa. Undang-undang pada nomor 6 tahun 2014 ini memberikan wewenang kepala desa untuk mengelola sumber daya lokal, mengambil keputusan penting terkait dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat, dan juga meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan desa. Melalui Undang-undang ini peneliti berharap dapat terbentuk desa yang mandiri, transparan dan berdaya saing untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam konteks pemilihan baik di desa, tingkat desa, tingkat nasional maupun tingkat lokal tentu selalu memiliki strategi politik, dimana seorang calon pemimpin tentunya terdapat suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Strategi politik merupakan sebuah scenario ataupun langkah-langkah yang telah dirancang sedemikian rupa oleh seorang calon pemimpin untuk memperoleh suatu tujuan yang ingin dicapai. Maka dari itu Strategi politik sangatlah berpengaruh besar dalam dinamika politik lokal bagi setiap calon pemimpin agar dapat mempermudah serta memperbanyak dukungan dari masyarakat. Dengan menggunakan dinamika politik yang tepat, calon pemimpin dapat memiliki peluang lebih besar untuk meraih suatu kemenangan yang menghasilkan pengaruh positif terhadap masyarakat yang dipimpin. Kesadaran dengan kemampuan yang baik tentang strategi politik sangat membantu calon pemimpin untuk memperoleh dukungan yang diperlukan dalam mencapai tujuan politik.

Di Desa Dewa Agung, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, pemilihan kepala desa selama tiga periode berturut-turut menunjukkan adanya strategi politik yang kuat dari petahana. Sadeli Efendi, kepala desa yang memenangkan tiga kali pemilihan berturut-turut, menggunakan strategi politik berbasis hubungan sosial, kedekatan dengan masyarakat, serta program pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi warga. Namun, dominasi politik kepala desa dalam waktu yang lama juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti minimnya regenerasi kepemimpinan, potensi ketimpangan politik, serta munculnya konflik antar kelompok yang berbeda kepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi politik kepala desa dalam memenangkan Pilkades selama tiga periode serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat.

Desa Dewa Agung merupakan pemekaran wilayah dari desa Induk Tulang Bawang dilakukan kepala desa terhadap masyarakat desa Dewa Agung, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Penelitian ini layak diteliti atas pertimbangan pertama, Sadeli Efendi menang pada periode pertama di desa Tulang Bawang pada tahun 2010, pada masa jabatannya Sadeli Efendi membentuk pemekaran wilayah pada desa tulang bawang sehingga satu Desa terbagi menjadi dua wilayah yaitu desa Dewa Agung, dalam dinamika politik lokal yang dilakukan oleh Sadeli Efendi adanya suatu kepentingan politik dikarenakan untuk mempertahankan kekuasaannya, kepala desa yang telah menjabat selama tiga periode di dua wilayah cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok mereka.

Hal ini dapat mengurangi kesempatan bagi kandidat baru untuk bersaing secara adil, serta dengan adanya dorongan struktur kekeluargaan yang kuat sangat membantu Sadeli Efendi untuk terus mempertahankan jabatannya. Dimana hubungan keluarga atau kerabat pada



dasarnya memainkan peran kunci dalam dinamika politik lokal. Setelah terjadinya pemekaran wilayah tersebut, hal ini membuat suatu peluang besar terhadap sadeli efendi untuk menjabatkan diri pada desa Dewa Agung untuk periode selanjutnya. Desa ini merupakan salah satu desa yang berada dibawah Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Desa ini mulai resmi dan terbentuk pada tahun 2016 yang mana dipimpin oleh Sadeli Efendi sebagai kepala desa periode pertama saat terjadinya pemekaran wilayah.

Terdapat dua calon Kepala Desa yang bersaing untuk meraih kedudukan sebagai Kepemimpinan di Desa Dewa Agung yakni Sadeli Efendi dan Gosri Leni. Kedua calon kepala desa ini sedang mempersiapkan cara atau strategi untuk mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Pada pemilihan kepala desa kali ini, Sadeli Efendi kembali melenggangkan kekuasaannya di Desa Dewa Agung untuk periode yang ketiga.

Pertimbangan Kedua, atas pencapaian Sadeli Efendi sebagai pemimpin pada periode kedua didesa Dewa Agung, Sadeli Efendi memperoleh keberhasilan atas pembangunan infrastruktur seperti pembangunan Jalan setapak menuju perkebunan yang mana menjadi penunjang ekonomi masyarakat, selain jalan setapak sadeli effendi juga membangun jalan menuju pemukiman warga, Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan lain-lain. Selain itu, Sadeli Efendi membuat Sumur bor yang membantu sebagian warga untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya pembentukan kelompok sosial dalam masyarakat, Sadeli Efendi membentuk kelompok sosial seperti Karang Taruna, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kelompok Tani, Pembentukan Kader Posyandu, Serta membagi Satu desa menjadi tiga dusun. Keberhasilan Sadeli Efendi dalam pembangunan Infrastruktur dan kelompok Sosial sangatlah berpengaruh terhadap masyarakat Dewa Agung sehingga menarik perhatian masyarakat untuk memilih kembali Sadeli Efendi sebagai Kepala Desa Petahanan. Pengalaman Sadeli Efendi memimpin kepala desa dua periode menjadi kekuatan besar dalam memahami karakternya dan menarik simpati masyarakat.

Memenangkan kontestasi pemilihan kepala desa pertama pada periode 2010-2015, pada tahun berikutnya Sadeli Efendi menjadi kepala desa. Dengan posisinya sebagai petahanan, Sadeli Efendi lebih unggul karena telah memperoleh kekuasaan, mempunyai basis sosial, dan merupakan calon yang terkenal. Pada periode kedua 2016-2021 Sadeli Efendi menggunakan Konstituen sebagai modal politiknya. Konstituen dapat dikatakan sebagai modal karena masyarakat menghormati aktor-aktor yang mempunyai pengaruh dan kekuasaan. Ada hal lain yang menjadikan konstituen sebagai modal sikap yang terbentuk dalam masyarakat. Dengan menjaga kedekatan konstituennya, Sadeli Efendi membentuk kepercayaan sosial antara dirinya dan konstituennya hingga saat ini menjadi modal sosial yang kuat untuk mempertahankan kekuasaannya.

Pemilihan kepala desa merupakan bagian dari proses demokrasi lokal yang sering kali diwarnai oleh dinamika politik yang kompleks. Desa Dewa Agung menjadi studi kasus yang menarik karena kepala desa petahana mampu bertahan selama tiga periode. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi politik yang digunakan dalam pemilihan kepala desa tiga periode berturut-turut.

Metode Penelitian

Fisher (1975:48) menyatakan, bahwa kebenaran adalah kebenaran ilmu bersifat relative. Kebenaran dapat berupa sesuatu, kejadian, dan fakta, argumentasi fakta, pertimbangan, preposisi, atau ide yang benar atau yang diterima sebagai sesuatu yang benar. Kebenaran dalam ilmu dibatasi fakta-fakta alam yang dapat diobservasi baik dengan menggunakan pancaindra maupun dengan memanfaatkan alat bantu teknologi serta kemampuan manusia/pengamat itu sendiri.

Oleh karena itu dimana dalam melakukan kegiatan Penelitian ini saya terjun langsung kelapangan guna untuk mengetahui permasalahan yang terjadi mengenai Dinamika Politik



Lokal Pemilihan Kepala Desa 3 Periode Studi Pada Desa Dewa Agung Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. Mengapa demikian supaya jelas tentang permasalahan-permasalahan tersebut terjadi karena apa dan mengapa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat dan aparat desa, observasi langsung terhadap kegiatan politik di desa, serta analisis dokumentasi pemilihan kepala desa.

Hasil dan Pembahasan

Politik Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) adalah suatu proses demokrasi yang berlangsung di tingkat desa, dimana masyarakat desa secara langsung memilih kepala desa untuk memimpin dan mengurus pemerintahan desa. Pemilihan kepala desa merupakan sarana untuk menetapkan pemimpin desa yang akan menerapkan kebijakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Proses ini penting karena kepala desa mempunyai peran strategis dalam memimpin pembangunan desa, mengelola sumber daya desa, dan pelayanan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemenangan kepala desa petahana selama tiga periode berturut-turut didukung oleh strategi yang kuat. Faktor utama mendukung adalah:

1. Pemanfaatan jejaring sosial dan hubungan kekeluargaan.
2. Strategi kampanye berbasis komunikasi personal dengan masyarakat.
3. Keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur dan program sosial.

Namun dominasi kekuasaan yang lama juga menimbulkan tantangan, seperti berkurangnya regenerasi kepemimpinan dan potensi konflik sosial.

A. Bentuk dinamika politik lokal pada desa Dewa Agung

Bentuk Dinamika politik lokal di Desa Dewa Agung, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, merupakan cerminan dari interaksi antara kekuatan politik di tingkat desa dan pengaruh eksternal dari kebijakan pemerintah daerah maupun nasional. Sebagai desa yang memiliki sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala desa, politik lokal di Dewa Agung sangat dipengaruhi oleh hubungan antara kepala desa, perangkat desa, dan warga. Selain itu, masyarakat desa juga memainkan peran penting dalam menentukan arah kebijakan lokal melalui partisipasi dalam musyawarah desa, pemilihan kepala desa, serta peran serta dalam program-program pembangunan yang dilaksanakan di tingkat desa.

Politik lokal di Desa Dewa Agung juga dipengaruhi oleh aspek sosial dan ekonomi di masyarakat. Isu-isu seperti alokasi dana desa, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat kerap menjadi topik hangat yang mempengaruhi dinamika politik. Terkadang, perbedaan pandangan politik antar kelompok atau individu di desa dapat menimbulkan ketegangan, namun hal ini juga dapat menjadi momentum terciptanya dialog yang konstruktif demi kemajuan desa. Dengan adanya interaksi antara kebijakan pemerintah, aspirasi masyarakat, dan kepemimpinan lokal yang kuat, dinamika politik lokal di Desa Dewa Agung selalu beradaptasi dengan perubahan yang ada sehingga menjadikannya sebagai wilayah dinamis dalam proses pembangunan desa. Seperti kepala desa yang telah menjabat untuk beberapa periode dapat memiliki kekuatan serta pengaruh yang kuat dalam mengambil keputusan politik di desa.

1. Unit-unit lokal pemerintah bersifat otonom dan independent. Unit-unit lokal otonom adalah unit pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya sesuai dengan ketentuan undang-undang dan kebijakan yang berlaku.
2. Pemerintah Daerah Batas-Batas Geografis. Proses pemekaran Desa Dewa Agung dimulai dengan adanya keputusan yang diambil pada masa kepemimpinan Sadeli Efendi sebagai Kepala Desa Tulang Bawang. Pada saat itu, Pemerintah Kabupaten



Way Kanan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2013 yang mengatur tentang pembentukan lima desa baru, salah satunya adalah Desa Dewa Agung.

3. Pemerintah Daerah memiliki status Korporat dan Kekuasaan Pemerintah daerah baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten memiliki status korporat sebagai badan hukum yang dapat mengelola dan bertindak dalam urusan hukum, dan juga memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk mengatur, membuat kebijakan, serta melaksanakan program-program yang berdampak pada masyarakat setempat.
 - a. Bentuk dinamika politik lokal Kepala Desa 3 Periode
 1. Pemanfaatan Jaringan Sosial: Dukungan dari tokoh agama dan adat menjadi kunci utama dalam memenangkan pemilihan.
 2. Kampanye Berbasis Komunikasi Personal: Petahana sering mengadakan pertemuan langsung dengan masyarakat untuk mendengar aspirasi mereka.
 3. Pemanfaatan program pembangunan sebagai alat politik.
 4. Penggunaan media sosial dan komunikasi digital dalam Pilkadaes.
 5. Strategi Penggalangan suara dan pendekatan kepada kelompok masyarakat.
 6. Pembangunan Infrastruktur sebagai Modal Politik: Keberhasilan dalam membangun jalan, fasilitas umum, dan pemberdayaan ekonomi meningkatkan popularitas petahana.

B. Dampak Politik Lokal Terhadap Masyarakat Desa Dewa Agung

Dampak politik lokal merujuk pada pengaruh yang ditimbulkan oleh dinamika politik dalam suatu komunitas, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun kebijakan pemerintahan. Begitu juga di Desa Dewa Agung, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, dampak politik lokal terlihat dari kebijakan positif seperti pengurangan pajak dan pembangunan infrastruktur, yang dirasakan masyarakat sebagai kemajuan. Namun, ada juga dampak negatif, seperti dominasi kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan dan praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa. Kebijakan pembangunan sering dianggap lebih menguntungkan kepala desa dan keluarganya, menciptakan ketimpangan dalam distribusi sumber daya. Selain itu, adanya tekanan sosial untuk memberikan suara setelah menerima bantuan menggambarkan ketidakseimbangan kekuasaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Devolusi adalah proses pemindahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau lokal untuk memberikan otonomi lebih dalam mengelola urusan pemerintahan sesuai kebutuhan dan karakteristik lokal. Di Desa Dewa Agung, devolusi terlihat dalam pemberian kewenangan kepada kepala desa dan aparat desa untuk mengambil keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat, seperti dalam kebijakan pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, dan penyaluran bantuan sosial.

Hasil Wawancara

1. Kepala Desa: Menjelaskan bagaimana strategi politik dan pembangunan digunakan untuk mempertahankan kekuasaan.
2. Calon Kepala Desa yang Kalah: Mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam menghadapi petahanan.
3. Tokoh Masyarakat: Memberikan perspektif mengenai dampak politik lokal terhadap stabilitas desa.
4. Masyarakat Umum: Mengutarakan pendapat tentang pemilihan kepala desa dan pengaruh politik dalam kehidupan sehari-hari.



5. Perangkat Desa: Menggambarkan bagaimana sistem pemerintahan desa dijalankan dalam kondisi dominasi petahanan.
6. Akademisi dan Pengamat Politik: Memberikan analisis terhadap dampak pemilihan kepala desa dalam konteks demokrasi lokal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Dinamika politik lokal di Desa Dewa Agung dipengaruhi oleh otonomi pemerintahan desa, batas geografis, dan kekuasaan kepala desa, yang memperkuat dominasi politik lokal. Dampaknya, ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik terjadi, dengan kebijakan yang tidak adil, praktik politik uang, serta dominasi elit desa yang mengurangi partisipasi masyarakat, menurunkan transparansi, dan menghambat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

Buku

- Aminah, Siti. (2014). *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*. Jakarta: Prena Damedia Group
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Dwiyanto, A. (2014). *Politik Lokal dan Desentralisasi*. Jakarta: Gramedia.
- Fisher, A. (1975). *The Principles of Scientific Research*. New York: Harper & Row.
- Muhammad Noor. (2012). *Memahami Desentralisasi Indonesia*. Yogyakarta: Interpena
- Soetomo T. (2013). *Politik Desa: Demokrasi dan Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- O'Neil, T. P. (1980). *All Politics is Local*. Boston: Beacon Press.

Skripsi

- Andayani, P. (2025). *Dinamika Politik Lokal Pemilihan Kepala Desa 3 Periode*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Eza Chrisniandika Orifice. (2021) *"Strategi Pemenangan Parsimin Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 di Desa Purwodadi, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen."* Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Kementrian dan Kebudayaan.
- Hafiz & M ihza Al. (2024). *Dinamika Politik Lokal (Studi Kasus Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pilkada 2024 di Kabupaten Langkat*. Universitas Sumatera Utara.
- Miles & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press

Jurnal

- Dhal, R. A. (1957). "The Concept of Power." *Behavioral Science*, 2(3), 201-215
- Jayadi, H. (2019). "Aktor Politik Pedesaan Dalam Demokrasi Pemilihan Kepala Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah." *Jurnal SIKAP (Solusi Ilmiah Kebijakan Dan Administrasi Publik)*.
- Pratama, J. (2023). Konflik Pilkades dan Dampaknya Pada Kehidupan Sosial Budaya Desa Gunung Jaya. *Jurnal Sosial Dan Budaya*.
- Rahman, A.(2019). "Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Desa: Studi Kasus di Kabupaten Ciamis." *Jurnal Ilmu Politik*, 7(2), 112-125